

**ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN KELANGKAAN BBM SOLAR
SUBSIDI DI BANDAR LAMPUNG**

(Policy Paper)

Oleh : Jumain

NPM: 2526061015

Mata Kuliah Analisis Kebijakan



**PRODI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

Policy Paper

ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN KELANGKAAN BBM SOLAR SUBSIDI DI BANDAR LAMPUNG

Executive Summary

BBM solar subsidi merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor transportasi, logistik, perikanan, pertanian, industri kecil, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ketersediaannya memengaruhi biaya produksi, distribusi barang, dan keberlangsungan berbagai sektor usaha, sehingga kebijakan subsidi berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Anderson, 2021).

Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan dan distribusi regional memiliki tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi yang tinggi sehingga kebutuhan terhadap BBM solar subsidi terus meningkat. Namun, dalam beberapa periode terjadi kelangkaan yang ditandai dengan antrean panjang di SPBU, keterbatasan stok, dan meningkatnya kesulitan masyarakat dalam memperoleh solar subsidi.

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi energi di Indonesia masih menghadapi kendala terkait ketepatan sasaran penerima manfaat dan efektivitas distribusi (Silbaqolbina & Najicha, 2022). Permasalahan distribusi juga dipengaruhi oleh ketidaktepatan sasaran penerima dan lemahnya pengawasan, serta potensi penyalahgunaan distribusi BBM (Gusvita, 2024).

Hasil analisis menunjukkan bahwa kelangkaan BBM solar subsidi di Bandar Lampung disebabkan oleh ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, penyalahgunaan distribusi, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan sistem distribusi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya antrean kendaraan, kenaikan biaya transportasi dan distribusi, serta terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi peningkatan pengawasan distribusi, optimalisasi digitalisasi pembelian BBM subsidi, evaluasi kuota berbasis kebutuhan daerah, dan penguatan koordinasi antarinstansi.

I. Introduction or Summary of the Problem

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kelangkaan BBM solar subsidi di Bandar Lampung merupakan salah satu persoalan kebijakan publik yang memiliki dampak cukup luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama pada sektor ekonomi, transportasi, dan distribusi logistik. BBM solar subsidi memiliki fungsi strategis sebagai sumber energi utama yang digunakan dalam berbagai aktivitas produktif seperti transportasi umum, distribusi barang dan jasa, sektor pertanian, perikanan, industri kecil, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ketersediaan BBM subsidi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat karena berkaitan langsung dengan biaya operasional, efisiensi distribusi, serta stabilitas harga barang dan jasa. Oleh karena itu, kebijakan subsidi memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Anderson, 2021).

Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung memiliki peran penting sebagai pusat perdagangan, jasa, pemerintahan, dan distribusi regional. Tingginya aktivitas ekonomi menyebabkan mobilitas masyarakat dan arus distribusi barang di wilayah ini terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, perkembangan sektor perdagangan, serta meningkatnya aktivitas usaha mendorong kebutuhan masyarakat terhadap BBM solar subsidi semakin tinggi dari waktu ke waktu. Kebutuhan BBM tersebut tidak hanya berasal dari masyarakat pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga berasal dari sektor usaha dan sektor produktif lain yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar dalam menjalankan aktivitasnya.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan BBM solar subsidi tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan kapasitas distribusi maupun penyesuaian kuota yang memadai. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara tingkat kebutuhan masyarakat dengan jumlah pasokan yang tersedia. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi energi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala terkait ketepatan sasaran penerima manfaat serta efektivitas sistem distribusi (Silbaqolbina & Najicha, 2022). Selain itu, distribusi BBM subsidi yang belum sepenuhnya tepat sasaran juga dapat memengaruhi efektivitas kebijakan subsidi energi (Darinda, 2022).

Fenomena kelangkaan BBM solar subsidi di Bandar Lampung ditunjukkan melalui meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa periode tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat harus menunggu dalam waktu yang relatif lama untuk memperoleh BBM solar subsidi. Situasi ini tidak hanya mengurangi produktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi seperti meningkatnya biaya operasional transportasi, keterlambatan distribusi barang, serta terganggunya aktivitas usaha yang bergantung pada penggunaan BBM solar subsidi.

Selain berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, kelangkaan BBM subsidi juga berpotensi memengaruhi stabilitas harga barang dan jasa. Peningkatan biaya distribusi akibat keterbatasan BBM dapat mendorong peningkatan harga kebutuhan masyarakat. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, maka dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan kelangkaan BBM solar subsidi memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak karena tidak hanya berkaitan dengan aspek ketersediaan energi, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas kebijakan distribusi dan ketepatan sasaran subsidi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab kelangkaan BBM solar subsidi serta upaya kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

1.2 Faktor Penyebab Kelangkaan BBM Solar Subsidi di Bandar Lampung

Permasalahan kelangkaan BBM solar subsidi tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan masyarakat, tetapi juga oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Keterbatasan pasokan dapat menyebabkan berkurangnya stok BBM di SPBU. Selain itu, masih ditemukan penyalahgunaan distribusi seperti penimbunan, pembelian berulang, penggunaan kendaraan yang dimodifikasi, serta penggunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak. Kondisi tersebut menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran sehingga masyarakat yang berhak mengalami kesulitan memperoleh BBM. Penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi dipengaruhi oleh disparitas harga, lemahnya pengawasan distribusi, dan celah dalam implementasi kebijakan (Suraya, 2025).

Kondisi tersebut menyebabkan distribusi subsidi menjadi tidak tepat sasaran sehingga masyarakat yang berhak menerima subsidi mengalami kesulitan memperoleh BBM. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi umumnya terjadi akibat perbedaan harga antara BBM subsidi dan non-subsidi, lemahnya pengawasan distribusi, serta adanya celah dalam implementasi kebijakan penyaluran subsidi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dan mengurangi akses masyarakat yang berhak terhadap BBM subsidi (Arsyad, 2014; Arliman, 2025).

Lemahnya sistem pengawasan distribusi juga menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kelangkaan BBM. (Gusvita, 2024) menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan distribusi menjadi salah satu penyebab ketidakefisienan kebijakan subsidi energi di Indonesia.

1.3 Faktor Penyebab Kelangkaan BBM Solar Subsidi

Permasalahan kelangkaan BBM solar subsidi tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan masyarakat, tetapi juga oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Keterbatasan pasokan dapat menyebabkan berkurangnya stok BBM di SPBU sehingga kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi secara optimal.

Selain itu, masih ditemukan penyalahgunaan distribusi seperti praktik penimbunan, pembelian berulang, penggunaan kendaraan yang dimodifikasi, serta penggunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak. Kondisi tersebut menyebabkan subsidi menjadi tidak tepat sasaran sehingga masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh subsidi mengalami kesulitan memperoleh BBM.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi dipengaruhi oleh disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi, lemahnya pengawasan distribusi, serta adanya celah dalam implementasi kebijakan penyaluran subsidi. Lemahnya sistem pengawasan distribusi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya kelangkaan BBM karena dapat mengurangi efektivitas kebijakan subsidi energi.

1.4 Dampak Permasalahan

Kelangkaan BBM solar subsidi menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat dan perekonomian daerah. Dampak tersebut meliputi meningkatnya biaya transportasi dan distribusi barang, terganggunya aktivitas sektor produktif, menurunnya efisiensi operasional pelaku usaha, serta meningkatnya beban ekonomi masyarakat. Selain itu, keterlambatan distribusi logistik akibat keterbatasan BBM juga dapat memengaruhi stabilitas harga barang dan jasa. Apabila kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka dapat menurunkan produktivitas masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

1.5 Urgensi Penanganan Masalah

Mengingat pentingnya peran BBM solar subsidi dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, diperlukan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk memastikan distribusi berjalan secara tepat sasaran. Penanganan yang tepat diperlukan agar permasalahan kelangkaan tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas serta mampu menjaga stabilitas aktivitas masyarakat dan sektor produktif.

Oleh karena itu, diperlukan langkah kebijakan melalui penguatan pengawasan distribusi, optimalisasi sistem digitalisasi, evaluasi kuota distribusi, serta penguatan koordinasi antarinstansi agar ketersediaan BBM solar subsidi dapat lebih terjamin dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Anderson, J. E. (2021). *Public Policymaking: An Introduction* (9th ed.). Cengage Learning.
- Dunn, W. N. (2020). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Gusvita, A. (2024). Analisis Kelangkaan dan Distribusi BBM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(2), 112–124.
- Silbaqolbina, Y., & Najicha, F. U. (2022). Kebijakan Pemerintah dalam Menaikkan Harga BBM dan Dampaknya terhadap Masyarakat Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5456–5465.
- Suraya, A. (2025). Efektivitas Pengawasan dan Regulasi Distribusi BBM Bersubsidi. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*.